

IMPLEMENTASI PROGRAM BEASISWA SEPULUH SARJANA PER DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

Alfian Dwi Refandi

NPP. 32.0502

Asdaf Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: alfianfandi2001@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Riyan Jaelani, S.STP, M.Tr.I.P.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The low achievement of the Human Development Index (HDI) in Bojonegoro, while the local government budget is the second highest in East Java, so that the Bojonegoro Regency Government through the education office issued a Ten Scholars in each Village Scholarship Program to increase the HDI by improving the quality of education. **Purpose:** This study aims to analyze and describe the implementation of the Ten Scholars in each Village Scholarship program for students in Bojonegoro Regency and to identify and describe the efforts of the Bojonegoro Regency Education Office in optimizing the Ten Scholars in each Village Scholarship program. **Method:** The method used is a descriptive qualitative method. The data collection technique of this research is by interviews and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawn. **Result:** The findings obtained by the author in this study were that the specified target was not achieved, the distribution of recipients was not even, there were delays in disbursement, and the requirements were not in accordance with the conditions of the target or students, as well as the lack of use of applications or technology. **Conclusion:** The implementation of Ten Scholars in each Village Scholarship program in Bojonegoro Regency has not been running optimally. This can be seen from the many indicators and dimensions of policy implementation according to Richard Matland that have not been met. Efforts that have been made include trying to launch a special application as soon as possible, dividing the scholarship fund disbursement process into two stages, and socializing the requirements and processes of the scholarship program.

Keywords: Program Implementation, Scholarships, Education, Undergraduate

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bojonegoro, sedangkan APBD yang dimiliki merupakan tertinggi kedua di Jawa Timur, sehingga Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui dinas pendidikan mengeluarkan Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa untuk meningkatkan IPM melalui peningkatan kualitas pendidikan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa bagi mahasiswa di Kabupaten Bojonegoro dan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dalam mengoptimalkan program. **Metode:** Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis

data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dianalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Richard Matland dengan lima dimensi yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu target yang ditentukan tidak tercapai, sebaran penerima belum merata, adanya keterlambatan pencairan, dan persyaratan yang kurang sesuai dengan kondisi target atau mahasiswa, serta kurangnya penggunaan aplikasi atau teknologi. **Kesimpulan:** Implementasi program beasiswa sepuluh sarjana per desa di Kabupaten Bojonegoro belum berjalan maksimal. Hal ini dilihat dari banyaknya indikator beserta dimensi implementasi kebijakan menurut Richard Matland yang belum terpenuhi. Upaya yang telah dilakukan yaitu berusaha untuk secepat mungkin meluncurkan aplikasi khusus, membagi proses pencairan dana beasiswa menjadi dua tahapan, dan sosialisasi mengenai persyaratan serta proses dari program beasiswa.

Kata kunci: Implementasi Program, Beasiswa, Pendidikan, Sarjana

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal fundamental untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor utama dalam pengembangan individu maupun masyarakat. Dengan pendidikan, manusia dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang ada dalam diri manusia tersebut pada suatu bidang, serta dengan pendidikan juga seseorang akan memperoleh pengalaman dan keilmuan yang tidak didapatkan di tempat lain (Muvid, 2022). Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam memberikan bantuan dan mendanai proses pendidikan untuk warga negara Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan dunia pendidikan (Kusnandar, 2018). Pemerintah Daerah memiliki wewenang terhadap pelaksanaan pendidikan. Hal ini tertuang dalam pada pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan merupakan urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Walaupun kewenangan daerah terbatas pada pendidikan dasar dan menengah, namun pemerintah daerah dapat menyalurkan kontribusinya pada pendidikan tinggi melalui bantuan dana untuk pendidikan tinggi yang dialokasikan pada APBD. Hal ini tertuang dalam pasal 83 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi.

Pendidikan merupakan salah satu dimensi untuk menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi Kesehatan dengan indikator Angka Harapan Hidup, dimensi pengeluaran dengan indikator berupa pengeluaran perkapita, dan dimensi pendidikan yang dapat dilihat dari dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) (Fauzan et al., 2020). Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tertinggi kedua di Jawa Timur sesudah Kota Surabaya dengan jumlah APBD sebesar 7,4 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2023). Dengan APBD yang besar ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bojonegoro masih cukup rendah apabila disandingkan dengan kabupaten/kota lain dengan APBD yang lebih kecil dari Kabupaten Bojonegoro. Pertumbuhan IPM Kabupaten Bojonegoro cukup lambat yang berada pada posisi lima terendah se-Jawa Timur (Badan Pusat Statistik, 2023). Tren capaian IPM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Capaian IPM Jawa Timur

NO	Kabupaten/Kota	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	Tren (%)
1	Kabupaten Trenggalek	68,73	69.46	69.74	70.06	71	1,34
2	Kabupaten Nganjuk	71.23	71.71	71.72	71.97	72.93	1,33
3	Kabupaten Lumajang	64.83	65.33	65.46	66.07	66.95	1,33
4	Kota Kediri	77.58	78.08	78.23	78.6	79.59	1.26
5	Kabupaten Tulungagung	71.99	72.62	73	73.15	74.06	1,24
6	Kabupaten Kediri	71.07	71.85	72.05	72,56	73,46	1.24
7	Kabupaten Sumenep	65.25	66.22	66.43	67.04	67,87	1,24
8	Kota Batu	75.04	75.88	75.9	76.28	77,22	1.23
9	Kabupaten Lamongan	71.97	72.57	72.58	73.12	74.02	1,23
10	Kota Probolinggo	72.53	73.27	73.27	73.66	74,56	1.22
11	Kota Pasuruan	74.78	75,25	75,26	75,62	76,54	1.22
12	Kota Blitar	77,58	78,56	78,57	78,98	79,93	1,20
13	Kabupaten Pacitan	67.33	68,16	68.39	68.57	69,37	1,17
14	Kabupaten Blitan	69.93	70.57	70.58	71.05	71.86	1,14
15	Kabupaten Ponorogo	69,91	70.56	70.81	71.06	71.87	1,14
16	Kota Mojokerto	77.14	77.96	78.04	78.43	79.32	1,13
17	Kabupaten Malang	69.4	70.35	70.36	70.6	71.38	1,10
18	Kabupaten Tuban	67,43	68.37	68.4	68,91	69,67	1,10
19	Kabupaten Pasuruan	67,41	68,29	68,6	68,93	69,68	1,09
20	Kabupaten Bondowoso	65,27	66,09	66,43	66,59	67,31	1.08
21	Kabupaten Bangkalan	62,87	63.79	64.11	64,36	65,05	1,07
22	Kabupaten Probolinggo	64,85	65,6	66,07	66,26	66,96	1,06
23	Kabupaten Ngawi	69,91	70.41	70.54	71.04	71,75	1,00
24	Kabupaten Mojokerto	72,64	73,53	73,83	74.15	74,89	1,00
25	Kabupaten Jember	65,96	66.69	67,11	67,32	67,97	0,97
26	Kabupaten Magetan	72,91	73,49	73,92	74.15	74,85	0,94
27	Kabupaten Sampang	61	61.94	62.7	62,8	63,39	0,94
28	Kota Madiun	80.33	80.88	80,91	81.25	82,01	0,94
29	Kabupaten Pamekasan	65,41	65,94	66.26	66.4	66.99	0.89
30	Kabupaten Gresik	75,28	76.1	76.11	76,5	77,16	0.86
31	Kabupaten Jombang	71.86	72.85	72,97	73,45	74.05	0.82
32	Kota Malang	80.89	81.32	81,45	82,04	82,71	0.82
33	Kabupaten Banyuwangi	70.06	70,6	70.62	71.38	71.94	0.78
34	Kabupaten Bojonegoro	67.85	68.75	69.04	69.59	70.12	0,76
35	Kabupaten Madiun	71,01	71.69	71,73	71,88	72,39	0,71
36	Kabupaten Situbondo	66,42	67,09	67,38	67,78	68,25	0.69
37	Kota Surabaya	81.74	82,22	82,23	82,31	82,74	0,52
38	Kabupaten Sidoarjo	79,5	80,05	80,29	80,65	81,02	0,46

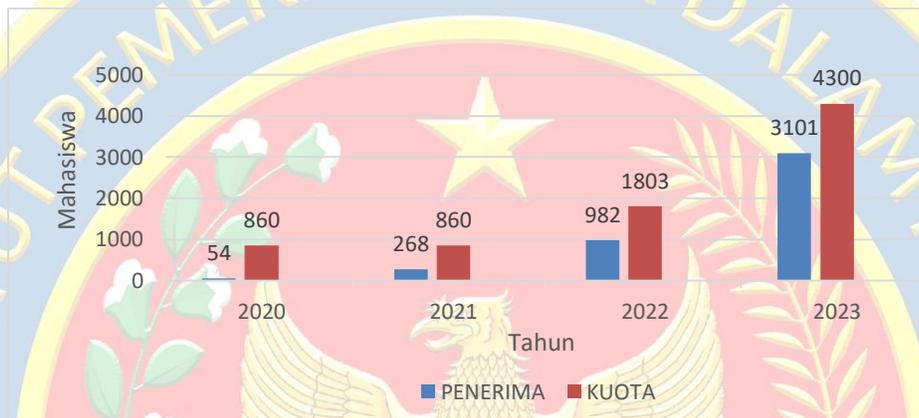
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa guna meningkatkan IPM Kabupaten Bojonegoro dalam bidang pendidikan. Program ini diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 tahun 2023 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 tahun 2019 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi. Program ini juga memiliki tujuan untuk pemerataan pendidikan. Dengan ditetapkannya kuota per desa, diharapkan akan melahirkan sarjana di setiap desa tersebut. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan pendidikan di setiap wilayah. Namun pada pelaksanaannya, target yang ditetapkan tidak tercapai setiap tahunnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur”

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan pada program beasiswa ini yaitu terletak pada pemenuhan target atau capaian yang telah ditentukan. Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membuka kuota yang cukup besar pada tahun 2023 dan 2024. Lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya yang hanya berjumlah dua kuota per desanya. Kuota yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak terisi dengan penuh setiap tahunnya. Jumlah penerima beasiswa dapat terlihat pada gambar berikut :

Gambar 1 Kuota dan Penerima Beasiswa



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, 2024

Program ini merupakan langkah yang sangat baik guna memotivasi para anak muda Bojonegoro agar lebih semangat guna meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan mereka. Namun sangat disayangkan apabila usaha dari pemerintah guna menciptakan sumber daya manusia yang lebih memumpuni dengan anggaran yang cukup besar ini tidak dimanfaatkan dengan maksimal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks kebijakan publik maupun konteks program beasiswa sarjana. Penelitian Muhammad Habib Hussein, Ulul Abab, dan Zaenal Fatah pada tahun 2023 yang berjudul “Implementasi Program Satu Desa Dua Sarjana dalam Membantu Mencegah Kesenjangan Pendidikan di Kabupaten Blora” (Hussein et al., 2023), menemukan bahwa administrasi program masih kurang teratur. Adanya ketidakpatuhan sasaran (mahasiswa) dalam aturan pengumpulan berkas. Namun pada aspek komunikasi pihak pelaksana program dan sumber daya dirasa cukup baik.

Penelitian Ulya Fitri dan Reza Novandri pada tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Sebagai Langkah Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pariaman”, menemukan bahwa secara umum program tersebut berjalan baik dan memberikan manfaat serta berdampak dalam penurunan angka putus kuliah. Namun masih terdapat kekurangan pada sumber daya, yaitu ketersediaan pegawai dalam implementasi dinilai kurang. Selain itu, terdapat kewenangan yang belum jelas pada setiap pegawai (Fitri & Novandri, 2022).

Penelitian Ulyatun Tasyak menemukan bahwa faktor pendukung implementasi Program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ponggok Kabupaten Klaten adalah empati pemerintah besar dan potensi serta kemampuan desa yang baik. Faktor penghambatnya yaitu administrasi desa tidak baik, mahasiswa tidak mematuhi aturan, dan pandemi covid (Tasyak, 2022).

Penelitian Akhmad Makhasin yang berjudul “Implementasi Program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana dalam Upaya Perlindungan Sosial di Desa Panggungharjo Sewon Bantul”, menemukan bahwa Implementasi dinilai berhasil karena sesuai dengan ketentuan program. Adanya dukungan dana yang cukup dan lingkungan yang mendukung menjadi faktor pendorong program ini. Terdapat hambatan berupa rendahnya pengetahuan mengelola keuangan. Keterbatasan sumber daya manusia dan alat komputer yang sudah tidak layak juga menjadi faktor penghambat program tersebut (Akhmad, 2023). Penelitian Amalia Nurhabibah mengenai efektivitas implementasi Program Beasiswa Karawang Cerdas di Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang, penulis menemukan bahwa program tersebut dinilai kurang tepat. Hal ini disebabkan oleh kinerja capaian dan tatanan pengelolaan yang kurang baik dari pihak yang bertanggung jawab (Nurhabibah, 2022).

Penelitian Aisyah Wanda Ramadhanty yang berjudul “Efektivitas Program Dua Sarjana Satu Desa Bagi Mahasiswa Tidak Mampu di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur”, menyatakan bahwa program tersebut memberikan dampak positif karena telah memberikan kemudahan bagi para mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi (Ramadhanty, 2023).

Penelitian Sabina dkk yang berjudul “Implementasi Program Beasiswa Full Sarjana di Kota Cilegon”, menemukan bahwa proses pelaksanaan program belum berjalan optimal karena adanya komunikasi yang kurang baik antara organisasi dengan masyarakat yang berakibat pada minimnya informasi terkait beasiswa (Sabina et al., 2024).

Penelitian Ari Azhari yang berjudul “Peran Program Satu Keluarga Satu Sarjana Baznas Bagi Ketahanan Keluarga”, mengungkapkan bahwa bantuan pendidikan telah meningkatkan kesejahteraan dalam menempuh pendidikan tinggi. Selain itu, program ini juga membantu meringankan beban keluarga miskin dan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga (Azhari, 2021).

Penelitian Tarisya Aulia Rahmanto yang berjudul “Implementasi Program Beasiswa Full Sarjana Untuk Mahasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi Asal Kota Cilegon”, menemukan bahwa Pelaksanaan program sudah berjalan cukup baik namun belum optimal. Sumber daya manusia, prasarana, anggaran, tanggapan masyarakat, dan kerja sama merupakan faktor pendukung dari program tersebut. Sedangkan faktor penghambat dari program tersebut yaitu informasi program tidak disosialisasikan dengan baik dan kurangnya sikap mendukung dari mahasiswa (Rahmanto, 2024).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi dari program beasiswa sepuluh sarjana per desa. Penelitian sebelumnya dari Hussein et al., 2023, Fitri & Novandri, 2022, Tasyak, 2022, Akhmad, 2023, Nurhabibah, 2022, Ramadhanty, 2023, Sabina et al., 2024, Azhari, 2021, dan Rahmanto, 2024 memiliki topik penelitian dan fokus yang tidak jauh berbeda dengan penulisan ini yaitu Program Beasiswa Sarjana. Beberapa penelitian sebelumnya tersebut disusun berdasarkan objek penelitian, tujuan penelitian, teori dan metode penelitian yang digunakan, persamaan dan perbedaan penelitian, serta hasil dari penelitian. Penelitian sebelumnya disusun dengan tujuan untuk mempermudah penulis dalam memahami perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ditemukan persamaan dan perbedaan pada penelitian tersebut. Persamaan yang terdapat yaitu pada objek dan metode yang digunakan yaitu terkait program beasiswa sarjana dengan metode kualitatif deskriptif. Terdapat juga satu penelitian yang memiliki lokus penelitian yang sama di Kabupaten Bojonegoro yaitu penelitian oleh Ramadhanty, 2023. Tetapi terdapat perbedaan pada fokus penelitian dan teori yang digunakan. Dari seluruh penelitian sebelumnya yang telah disebutkan, perbedaan yang sangat jelas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat pada fokus penelitian. Dimana penelitian ini lebih berfokus pada implementasi dan upaya optimalisasi program.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa bagi mahasiswa di Kabupaten Bojonegoro dan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dalam mengoptimalkan program.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam melaksanakan pengamatan. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berkaitan dengan masalah sosial dan kemanusiaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok (Creswell & Poth, 2018). Metode yang digunakan oleh penulis pada proses pengamatan adalah menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode yang bertujuan menggambarkan fenomena sesuai dengan kenyataan yang terjadi, dan untuk menguraikan gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan indikator yang ada (Handayani, 2020). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Kepala Desa Sugihwaras, Kepala Desa Drenges, Kepala Desa Margomulyo, dan dan mahasiswa (dalam hal ini penerima beasiswa sebanyak 3 orang). Untuk menentukan informan tersebut, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik yang dapat membantu dalam menentukan sampel dari sebuah penelitian yang didasarkan pada pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020). Pertimbangan tersebut adalah pihak atau orang yang memiliki penguasaan terhadap informasi dari objek penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dengan berfokus kepada implementasi atau pelaksanaannya serta upaya optimalisasi program. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Implementasi program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa bagi mahasiswa di Kabupaten Bojonegoro

Penulis mengkaji bagaimana implementasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa di Kabupaten Bojonegoro menggunakan teori dari Richard Matland (1995). Dalam teori ini, keberhasilan implementasi dibagi dalam 5 (lima) dimensi yakni tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses.

A. Tepat Kebijakan

Tepat kebijakan adalah salah satu dimensi keberhasilan dari implementasi apakah sebuah kebijakan sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan (Matland, 1995). Kebijakan publik yang tepat akan mendorong pembangunan daerah (Abdoellah & Rusfiana, 2016). Terdapat beberapa indikator pada dimensi tepat kebijakan. Pertama, pemecahan masalah yaitu sejauh mana sebuah kebijakan mampu menyelesaikan permasalahan atau memutus masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Terkait indikator tersebut, terlihat bahwa Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa dapat memecahkan masalah terkait dengan capaian indeks pembangunan manusia yang rendah dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Terdapat peningkatan indeks pembangunan manusia pada dimensi pendidikan setelah diluncurkannya program beasiswa tersebut. Dimana Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan.

Dengan meningkatnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang merupakan indikator dari capaian pendidikan, maka pastinya juga mempengaruhi IPM di Kabupaten Bojonegoro. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 IPM dalam dimensi Pendidikan

TAHUN	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	IPM (%)
2019	12,36	7,09	68,75
2020	12,39	7,33	69,04
2021	12,68	7,38	69,59
2022	12,84	7,43	70,12
2023	12,92	7,45	71,8
2024	13,18	7,59	72,08

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, 2025

Kedua, sesuai karakter masalah. Dalam hal ini, program beasiswa dinilai sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan, namun pada pelaksanaannya masih terbilang konvensional. Dimana mahasiswa yang ingin mendaftar beasiswa mengeluhkan kurangnya penggunaan teknologi. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro memang belum memiliki aplikasi atau teknologi khusus untuk proses pendaftaran dan proses seleksi atau penyaringan mahasiswa. Proses pendaftaran hingga seleksi dilakukan secara manual. Ketiga, kesesuaian karakter masalah sudah sangat baik dimana keterbukaan atau transparansi dari proses dapat dipantau melalui *website* dan disebutkan secara rinci alasan mahasiswa lolos atau tidak. Keterbukaan penyelenggaraan merupakan prinsip dasar pemerintahan (Labolo et al., 2020).

B. Tepat Pelaksana

Suatu kebijakan dapat berhasil apabila pelaksana kebijakan atau pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan atau program sesuai dengan kemampuan serta sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sumber daya manusia merupakan aset penting dalam organisasi publik (Syafri & Alwi, 2019). Terdapat dua indikator pada dimensi ini. Pertama, *stakeholder* terkait dimana dinas pendidikan merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program ini. Hal ini sudah sesuai karena beasiswa merupakan aspek yang berkaitan dengan pendidikan. Selain itu, pembagian tugas dari tim seleksi juga sudah dijelaskan dengan rinci melalui surat keputusan kepala dinas yang dikeluarkan setiap tahunnya. Pembagian kerja merupakan salah satu pilar pengorganisasian (Rowa, 2021). Kedua, kolaborasi yang dilakukan dengan pihak lain terkait guna mendukung program beasiswa. Sebagai sosialisator terdapat desa, kecamatan, SMA/SMK, dan kampus. Kolaborasi juga dilakukan dengan BPKAD yang memiliki peran dalam pendanaan program beasiswa ini. Untuk pencairan dana kepada mahasiswa penerima beasiswa, terdapat kerja sama dengan pihak Bank Jatim.

C. Tepat Target

Indikator pertama dari dimensi ini adalah kesesuaian target dengan rencana. Target yang ditentukan setiap tahunnya tidak dapat tercapai. Dimana kuota penerima beasiswa yang ditetapkan setiap tahunnya

tidak terisi dengan penuh. Indikator kedua yaitu kesiapan target. Secara pengetahuan mengenai program, target dalam hal ini mahasiswa atau calon mahasiswa sudah tersosialisasi dan mengetahui adanya program ini. Namun persyaratan yang ditentukan kurang sesuai dengan kondisi target. Hal ini sesuai dengan wawancara dari salah satu kepala desa yang mengatakan “Banyak anak-anak kami yang sudah mendaftar, namun terkendala pada persyaratan yang akhirnya membuat mereka tidak lolos. Seperti nilai dan akreditasi prodi maupun kampus”. Beberapa masyarakat mengurungkan niatnya untuk mendaftar karena beasiswa ini hanya menanggung Uang Kuliah Tunggal (UKT). Sedangkan masyarakat berpikir untuk melanjutkan kuliah pastinya tetap membutuhkan biaya hidup. Indikator ketiga, yaitu kebaruan kebijakan. Program Beasiswa Sarjana per Desa Kabupaten Bojonegoro merupakan inovasi baru dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam bidang pendidikan. Program ini awalnya menargetkan dua mahasiswa per desa yaitu pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Program ini diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 tahun 2019 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi. Perbup ini sudah mengalami empat kali perubahan yaitu Perbup Nomor 5 Tahun 2020, Perbup Nomor 33 Tahun 2020, Perbup Nomor 52 Tahun 2021, dan yang terakhir Perbup Nomor 17 Tahun 2023. Terdapat pembaharuan atau peningkatan target pada tahun 2023 yaitu menjadi sepuluh per desa yang didasarkan pada perubahan perbup yang terakhir. Pembaharuan yang baik pada program ini sayangnya belum diikuti dengan peningkatan penggunaan teknologi secara maksimal. Terdapat beberapa proses yang masih dilakukan secara konvensional atau manual.

D. Tepat Lingkungan

Lingkungan dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan dilaksanakan. Lingkungan yang baik akan mendorong proses dari sebuah kebijakan dan sebaliknya lingkungan yang buruk akan menghambat jalannya kebijakan. Lingkungan pertama yaitu lingkungan internal merupakan kondisi sumber daya yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Dalam program beasiswa ini, lingkungan internalnya adalah lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Kondisi internal Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro telah mendukung penuh program ini. Walaupun tidak ada bimbingan teknik khusus mengenai program ini, petunjuk teknis (juknis) yang ada sudah dapat membuat para pegawai mengerti tugas masing-masing berkaitan tanggung jawabnya dalam program ini. Ditambah dengan adanya koordinasi internal yang membuat lingkungan internal mendukung jalannya program ini. Hal ini juga membuat para pegawai memberikan ide atau hal yang dapat mempermudah jalannya program. Kedua, lingkungan eksternal merupakan lingkungan diluar organisasi yang dapat mempengaruhi sebuah kebijakan. Media atau berita baik online maupun offline merupakan salah satu pihak eksternal yang mendorong keberhasilan program ini. Media swasta yang ada di Bojonegoro bahkan Jawa Timur hingga nasional kerap memberitakan program ini sehingga program ini dapat diketahui oleh masyarakat luas. Selain media, masyarakat khususnya penerima beasiswa juga memberikan respon serta tanggapan positif. Program ini dinilai dapat membantu mereka yang kurang mampu dan mereka yang ketakutan terhadap biaya kuliah.

E. Tepat Proses

Pertama, alur atau tahapan rencana program sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Namun terdapat kendala yang dihadapi seperti banyaknya proposal yang masuk namun sumber daya atau pegawai yang ada tidak cukup banyak. Hal ini menyebabkan penumpukan proposal yang akhirnya membutuhkan waktu yang lebih lama dari waktu yang telah ditentukan. Kendala lainnya yaitu pada saat pencairan dana. Ketika ada salah satu mahasiswa yang belum menyelesaikan data atau berkas maka akan menghambat pencairan seluruh mahasiswa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesalahan mahasiswa dalam mengisi nomor rekening, nomer telepon ganti dan tidak konfirmasi ke tim seleksi, dan

kurangnya mahasiswa dalam memahami setiap prosedur yang telah dijelaskan. Kedua, terkait dengan pengendalian proses atau pengawasan pada program beasiswa ini. Dari internal dinas pendidikan pengendalian proses ini dilakukan oleh penanggung jawab tim seleksi beasiswa yaitu kepala dinas pendidikan yang melakukan pengawasan melalui data dan laporan program serta melakukan koordinasi internal agar proses tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dinas pendidikan juga diminta untuk menginput data dan nama-nama mahasiswa penerima beasiswa sebagai laporan kepada pemkab dan masyarakat melalui *website* resmi dinas pendidikan dan Satu Data Bojonegoro. Pihak eksternal lain yang ikut mengawasi program ini yaitu Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun ketiga pihak ini, tidak hanya mengawasi pada program beasiswa sepuluh sarjana saja tetapi lebih menyeluruh kepada kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

3.2. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro untuk mengoptimalkan Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa di Kabupaten Bojonegoro

Terdapat beberapa upaya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dalam mengatasi kendala dan hambatan pada program seperti mengajukan permintaan aplikasi khusus kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro selaku pembuat dan pihak yang memiliki hak dalam hal tersebut. Dengan adanya aplikasi, diharapkan dapat membuat proses yang ada dapat lebih efektif dan efisiensi. Kedua, membagi proses pencairan dana menjadi dua tahap. Dengan dibaginya tahap dalam pencairan, mahasiswa yang sudah menyelesaikan persyaratan dan data akan dicairkan terlebih dahulu. Sehingga tidak perlu menunggu mahasiswa lain yang masih terkendala. Ketiga, sosialisasi mengenai persyaratan dan proses dari program beasiswa. Sosialisasi ini dilakukan untuk kedua belah pihak yaitu mahasiswa dan dinas pendidikan. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga untuk mendaftarkan diri datang dan membuat proposal. Dinas pendidikan juga tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk mengecek terlalu banyak proposal. Sehingga proses penyaringan dan seleksi penerima beasiswa tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa di Kabupaten Bojonegoro memberikan banyak dampak positif pada kualitas pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Terobosan ini memberikan motivasi bagi anak muda yang kurang mampu untuk meneruskan pendidikan tinggi dengan mudah. Beasiswa ini membuka akses kepada warga Bojonegoro untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Layaknya temuan Ramadhanty (Ramadhanty, 2023).

Layaknya program lainnya, program beasiswa ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah pemanfaatan teknologi dalam proses pendaftaran hingga seleksi diakui belum maksimal. Selanjutnya persyaratan dari program ini yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi target atau mahasiswa yang ada di Bojonegoro. Hal ini membuat jumlah penerima manfaat atau penerima beasiswa kurang maksimal. Temuan lain yang cukup menarik yaitu pada sebaran penerima beasiswa. Dimana terdapat desa yang kuota terisi dengan penuh namun masih terdapat beberapa desa yang tidak terisi. Dari 430 desa dan kelurahan, terdapat 11 desa/kelurahan yang kosong atau tidak ada penerima beasiswa dan hanya terdapat 51 desa/kelurahan yang memenuhi target sepuluh mahasiswa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan penulisan secara komprehensif pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan terkait dengan Implementasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Implementasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur belum berjalan secara maksimal. Terdapat hal-hal yang menjadi hambatan yaitu pada dimensi tepat kebijakan yang dimana program ini masih minim dalam penggunaan teknologi dan aplikasi sehingga dapat dikatakan masih konvensional. Selanjutnya, pada dimensi tepat target belum bisa dikatakan optimal karena target yang ditentukan tidak tercapai, sebaran penerima belum merata, dan persyaratan yang kurang sesuai dengan kondisi target atau mahasiswa. Terakhir, pada dimensi tepat proses juga belum maksimal karena selain prosesnya yang masih offline, terdapat ketidaktepatan waktu atau adanya keterlambatan pada proses sehingga berdampak pada keterlambatan pencairan dana beasiswa kepada mahasiswa.

2. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro untuk mengoptimalkan Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa di Kabupaten Bojonegoro yaitu peningkatan penggunaan teknologi dengan berusaha untuk secepat mungkin meluncurkan aplikasi khusus guna mendukung program beasiswa, membagi proses pencairan dana beasiswa menjadi dua tahapan, dan sosialisasi mengenai persyaratan serta proses dari program beasiswa.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada kelurahan atau desa tertentu yang memiliki jumlah penerima beasiswa terbanyak dan paling sedikit serta desa atau kelurahan yang tidak terdapat penerima beasiswa.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program beasiswa sarjana di Kabupaten Bojonegoro untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan lebih fokus pada penentuan kuota atau target.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan sejumlah kepala desa yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A., & Rusfiana, Y. (2016). *BUKU - TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.pdf*.
- Akhmad, M. (2023). Implementasi Program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana Dalam Upaya Perlindungan Sosial Di Desa Panggungharjo Sewon Bantul. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 12(1), 1–19.
- Azhari, A. (2021). Peran Program Satu Keluarga Satu Sarjana Baznas Bagi Ketahanan Keluarga. *Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine*, 4(2), 670–691.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Tren Capaian IPM Jawa Timur*. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/V25GaFNHaExaMnhITm1sWmRrUIJZelJzYUc1SGR6MDkjMw==/indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2023.html>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design*.
- Fauzan, M., Nusantara, A., Nawatmi, S., Agus Budi Santosa, D., Pascasarjana, P., Stikubank Semarang, U., Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang, F., Kendeng Bendan Ngisor Semarang, J. V., & Artikel, I. (2020). Indeks Pembangunan Manusia dan Pendidikan di Jawa Tengah. *Jbe*, 27(1), 49–58. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/>
- Fitri, U., & Novandri, R. (2022). Implementasi Kebijakan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Sebagai Langkah Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pariaman. *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, 101.
- Handayani, R. (2020). Metode Penelitian Sosial. In *Bandung* (Issue September).

- Hussein, M. H., Albab, U., & Fatah, Z. (2023). Implementasi Program Satu Desa Dua Sarjana Dalam Membantu Mencegah Kesenjangan Pendidikan Di Kabupaten Blora. *SAP; Soetomo Administrasi Publik*, 1(3), 145–160.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. In *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)* (www.djpk.kemenkeu.go.id) (Vol. 20, p. 20). <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2017.pdf>
- Kusnandar, I. (2018). Analysis Of Certification Policy Implementation. *JETL (Journal Of Education, Teaching and Learning)*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.26737/jetl.v3i1.602>
- Labolo, M., Rohmansyah, H., & Rumbekwan, M. (2020). Political Reforms and the Role of Parliament in Promoting Good Governance through the Integration of Religious Views in National Politics. *Talent Development & Excellence*, 12(1), 3324–3330. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=144307390&lang=ja&site=ehost-live>
- Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145–174. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a037242>
- Muvid, M. B. (2022). Konsep Pemerataan Pembangunan Pendidikan Nasional Sebagai Alternatif Kemajuan Pendidikan Indonesia. *Widya Balina*, 7(2), 469–476. <https://doi.org/10.53958/wb.v7i2.153>
- Nurhabibah, A. (2022). Efektivitas Implementasi Program Beasiswa Karawang Cerdas di Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Rahmanto, T. A. (2024). Implementasi Program Beasiswa Full Sarjana Untuk Mahasiswa Kurang Mampu Dan Berprestasi Asal Kota Cilegon. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 13(2), 18–32.
- Ramadhanty, A. W. (2023). Efektivitas Program Dua Sarjana Satu Desa Bagi Mahasiswa Tidak Mampu Di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. 11(1), 1–14.
- Rowa, H. (2021). Organisasi Pemerintahan dalam Teori dan Praktik. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 1–22.
- Sabina, S., Defa, P., Stiawati, T., & Rahayu, S. (2024). Implementasi Program Beasiswa Full Sarjana di Kota Cilegon. *Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(5), 01–10.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari (ed.); 3rd ed.). Alfabeta.
- Syafri, W., & Alwi. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUS_AT_STRATEGI_MELESTARI
- Tasyak, U. (2022). Implementasi Kebijakan Program Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pongok Kabupaten Klaten. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 11(4), 73–85.